

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah, oleh karena itu ekonomi secara terus menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan sebagainya.¹ Jika hal ini ditangani dengan baik yaitu menggunakan sistem ekonomi Islam, yang akan bertujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.² Saat ini peran lembaga keuangan baik yang syariah maupun yang non syariah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin meningkatkan ekonominya demi mencapai kesejahteraan hidup, dari kegiatan berinvestasi, menabung sampai pada pendanaan yang dibutuhkan masyarakat untuk memulai usaha ataupun mengembangkan usaha yang telah dijalaninya.

Salah satunya dengan adanya Perbankan Syariah di Indonesia berbagai pembiayaan dan pendanaan bisa diajukan. Selain itu Bank Syariah ini bertujuan untuk mewadahi penduduk di Negara Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam.³ Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama Islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang

¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. I, hlm. 90.

² *Ibid.*, hlm. 91-92.

³ Karnaen A. Perwata atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), cet. III, hlm. 1-2.

melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat islami.⁴ Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya, banyak masyarakat yang tidak menaruh kepercayaan terhadap perbankan syariah.⁵ Selain itu tujuan bank syariah untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam yang didalamnya terdapat beberapa larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan memberikan zakat.

Dalam pelayanannya lembaga keuangan syariah memberikan produk dari mulai penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*lending*) dan jasa (*service*). Dan salah satunya dari produk pembiayaan menggunakan akad *murābahah*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, *murābahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁶

Karakteristik yang ada dalam *murābahah* yaitu si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang berguna dalam mendapatkan barang yang diinginkan nasabah. Sesuai dengan fiqh muamalah yang tertera dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bahwa bank membeli barang yang

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 140.

⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 10.

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

dibutuhkan nasabah atas nama bank dan bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Juga dalam ketentuan ke satu poin sembilan mengatakan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁷

Dari penjelasan diatas maka *murābahah* dapat diartikan sebagai salah satu jual beli (pembiayaan) dengan tambahan nilai yang diberikan oleh pembeli kepada penjual, sebagai laba untuk penjual sesuai dengan kesepakatan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama poin sembilan dikatakan jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Berkaitan dengan ketentuan diatas mengenai akad *murābahah* yang dilaksanakan setelah ada barang, seharusnya bukan menjadi bahan pertanyaan sebab saat ini manusia sedang ada pada zaman modern yang rata-rata penduduknya mengikuti adat sesuai kebiasaan yang seiring berjalannya waktu bisa berubah-ubah dengan diiringi teknologi yang semakin canggih tentunya.

Adanya perjanjian akad *murābahah* sebelum atau sesudah adanya barang itu tergantung sesuai dengan barang ataupun uang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Dari proses akadnya ke penyerahan barang maka dibutuhkan serah terima yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Serah terima itu sendiri diartikan

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murābahah*.

sebagai penyerahan dan penerimaan dalam bentuk apapun (barang), pihak yang satu menyerahkan dan pihak lain yang menerima.⁸ Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut bagaimana serah terima barang yang dilakukan oleh bank yang kenyataannya *hukmi* (secara simbolik) sedangkan masyarakat hanya mengetahui serah terima secara *hakiki* (langsung) itu berlangsung pada pembiayaan mikro yang saya teliti di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-sumedang. Judul penelitian yang digunakan adalah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Serah Terima Barang Pada Produk Mikro Di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang”.

B. Rumusan Masalah

Di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang akad *murābahah bil wakalah* digunakan untuk produk mikro, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat serah terima barang secara (*Al-qabdu al-hukmi*) tidak langsung. Namun pada kenyataannya masyarakat cenderung lebih memahami dan mengetahui serah terima secara langsung (*Al-qabdu hakiki*) saja. Dari pernyataan penelitian ini rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan penerapannya pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang?
2. Bagaimana sistem serah terima yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang dalam penerapannya di pembiayaan *murābahah* untuk produk mikro?

⁸ <http://kbbi.web.id/serah+terima> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). Diakses pada hari Rabu, 01 Febuari 2017 Pukul 12:56.

3. Bagaimana harmonisasi serah terima barang pada produk mikro di pembiayaan *murābahah* dengan yang diterapkan oleh hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan masalah yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan penerapannya pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang.
2. Untuk mengetahui sistem serah terima yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang dalam penerapannya di pembiayaan *murābahah* untuk produk mikro.
3. Untuk mengetahui harmonisasi serah terima barang pada produk mikro di pembiayaan *murābahah* dengan yang diterapkan oleh hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sedikit pemikiran mengenai ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam akad pembiayaan *murābahah bil wakalah*, serta dapat menambah kepustakaan.
 - b. Menambah pengetahuan di bidang ilmu fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad akad pembiayaan *murābahah bil wakalah* yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis

- c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam menyalurkan dana yang berbasis bagi hasil.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Teori yang telah didapatkan akan dicari kesesuaiannya antara di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap serah terima pada produk mikro di Bank BRI Syariah kcp Tanjungsari-Sumedang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penulis pun sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang membuat penelitian tentang yaitu skripsi yang ditulis Nurul Qamar (2015), menganalisis prosedur pembiayaan mikro dengan *murābahah* pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KC Pekanbaru ditinjau dalam perspektif Islam.⁹ Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur pembiayaan mikro pada BRI Syariah KC Pekanbaru telah sesuai dengan prosedur umum yang berlaku dalam perbankan syariah sesuai dengan peraturan bank Indonesia dan surat edarannya, tapi ada beberapa hal detail sebagai nilai tambah yang dilakukan BRI Syariah sebagai *service* kepada nasabahnya yaitu marketing membantu nasabah dalam

⁹ Nurul Qamar (2015), *Analisis Prosedur Pembiayaan Mikro Dengan Murābahah Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KC Pekanbaru Ditinjau Dalam Perspektif Islam*. (skripsi S1, UIN Riau).

pengurusan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan mikro jika nasabah yang bersangkutan sibuk dengan bisnisnya hingga kurangnya waktu untuk mengurus persyaratan tersebut, serta layanan jemputan angsuran atau CPU (*Cash Pick Up*), selanjutnya tinjauan ekonomi Islam terhadap prosedur pembiayaan mikro dengan akad *murābahah* pada BRI Syariah KC Pekanbaru telah sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu pada kasus potongan pelunasan lebih awal telah sesuai dengan fatwa No 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan *murābahah*, kemudian untuk diskon telah sesuai dengan fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon *murābahah*.¹⁰ Namun terdapat ketidakjelasan atau *gharar* dalam aplikasi fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/ IV/2000 tentang *Murābahah* yaitu pada point ke 9 (sembilan) yang mengatakan bahwa Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, karena tidak terdapat peraturan yang jelas mengenai mekanisme penandatanganan ini dalam SOP atau disebut Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro BRI Syariah, sehingga menyebabkan *jahalah* atau ketidaktahuan karyawan pembiayaan mikro mengenai hal ini.

Kemudian dalam skripsinya Ahmad Jaelani (2015) yang berjudul analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro pada akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur¹¹, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri merupakan produk alternatif pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri yang diperuntukkan bagi pengusaha yang

¹⁰DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon *murābahah*.

¹¹Ahmad Jaelani (2015) *Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur*. (skripsi S1, UIN Semarang).

skalanya sangat terbatas atau bisa disebut UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan menggunakan akad *murābahah*. Aplikasi akad jual beli *murābahah* pada produk pembiayaan mikro dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan FATWA No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Penelitian ini menghasilkan pelaksanaan mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur yang terdiri atas pembukaan, pelunasan dan penutupan melibatkan antara nasabah pembiayaan dengan karyawan bagian *customer service, account office, dan teller*, serta direktur dengan alur yang sederhana dan mudah. Mekanisme tersebut hampir sama dengan mekanisme yang digunakan oleh bank-bank lain, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dan modifikasi.

2. Kerangka Berfikir

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Ruang lingkup muamalah mencakup bagaimana transaksi itu dilakukan, hal ini menyangkut dengan etika *adabiyah* suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Kemudian, bentuk transaksinya menyangkut materi *madiyah* transaksi yang dilakukan seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan pemindahan hutang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dari ruang lingkup tersebut maka prinsip-prinsip muamalah

berada pada wilayah etika *adabiyah* prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip muamalah yaitu bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya, dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan, didasari atas niat baik dan kejujuran, dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam dan lain sebagainya.¹²

Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda, salah satunya dari sudut pandang syarat penyerahan barang secara langsung atau tidak. Menurut Prof. Dr. Abdullah Al-Muslih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi, akad yang tidak mengharuskan serah terima barang secara langsung pada saat akad itu diperbolehkan.¹³ Selain itu identifikasi akad adalah hal yang sangat penting sebelum menghukumi haram atau halal sebuah transaksi bisnis tersebut. Jadi tidak hanya melihat dari sisi Fatwa DSN MUI nya saja, namun masyarakat harus lebih meninjau hukum lain seperti KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) kemudian terhadap masyarakat kebiasaan sebagai mana adat yang sudah sering mereka gunakan.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 5. Cet. 1, hlm. 49.

¹³ Abdullah Al-Muslih & Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq. 2015), hlm. 32-38.

Dalam Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 tahun 2004 (Kepmen No.91/kep/IV/KUKM/DV2004), Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.¹⁴

Perbedaan yang mendasar antara pembiayaan di syariah dan pembiayaan di konvensional yang pertama adalah dalam pembiayaan konvensional kredit diberikan atas akad pinjaman, dan nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman bersama bunga. Sedangkan dalam pembiayaan syariah tidak menggunakan prinsip akad bunga, namun menggunakan akad *murābahah* (jual beli), *ijarah wa iqtina* (sewa dengan perubahan kepemilikan) dan *musyarakah muthanaqishah* (*capital sharing*). Selain itu pada pembiayaan konvensional nasabah sepenuhnya menanggung resiko jika tidak bisa membayar kembali cicilan namun karena prinsip akad dalam pembiayaan syariah bank pun ikut menanggung sebagian resiko.¹⁵

kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya salah satunya yaitu *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* mengikuti prinsip-prinsip *murābahah* sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan hukum syariah. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan

¹⁴Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007, Jakarta : 2011, hlm. 4.

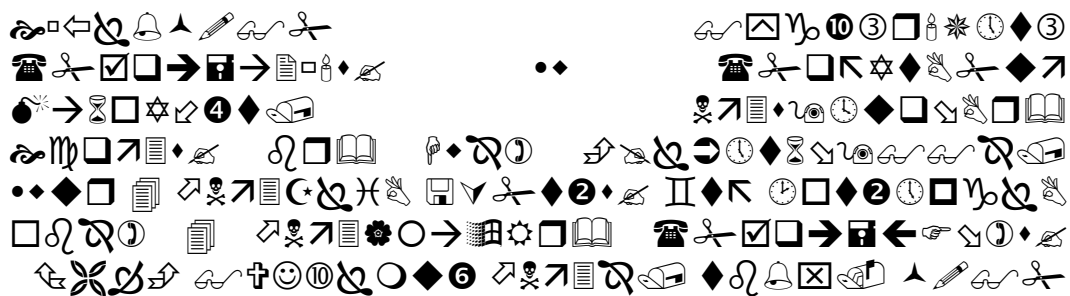
¹⁵ Sigit Tiandaru & Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 6.

Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai *murābahah*, yaitu Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Secara istilah, Wahbah al-Zuhailiy mengutip beberapa definisi yang diberikan oleh para imam mujtahid. Diantaranya : Ulama Hanafiyah mengatakan, *murābahah* adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat *murābahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan dengan harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa *murābahah* adalah salah jenis dari jual beli, khususnya jual beli amanah. Maka landasan syar'i *murābahah* adalah keumuman dalil syara' tentang jual beli. Diantaranya:

a. Qs. An-Nisa: 29



¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85.

◆ 0 □ → 1 □ → 2 □ = 3
 ◆ 0 □ 1 □ → 2 □ 3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁸






¹⁷ Muhammad Noor, Ulfah Munawar & Latifah Yuliana, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), Q.S An-Nisa [4] : 29, hlm. 65.

¹⁸ Muhammad Noor, Ulfah Munawar & Latifah Yuliana, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), Q.S Al-Baqarah [2] : 275, hlm. 36.

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁹

c. Qs Al-Maaidah: 1



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²⁰

d. Al-Hadits

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. (HR An Nasa’i)”.²⁰

Hadits di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murābahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat jual beli *murābahah*, seperti

¹⁹ Muhammad Noor, Ulfah Munawar & Latifah Yuliana, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), Q.S Al-Baqarah [2] : 280, hlm. 37.

²⁰ Muhammad Noor, Ulfah Munawar & Latifah Yuliana, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), Q.S Al-Maidah [5] : 1, hlm. 84.

penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.²¹

Salah satu usaha pembiayaan yang memakai akad *murābahah* adalah usaha mikro. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan hasil usaha penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).²²

Di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari, dalam produk mikronya menggunakan akad *murābahah bil wakalah* yang mana berarti bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Dalam hal ini terdapat suatu pernyataan ketetapan bank itu sendiri bahwa menyerahkan barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang kepada bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya akad ini atau jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak.

Dalam fiqh Islam terdapat proses transaksi baik secara umum atau khusus, serah terima merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Istilah *taqabudh* (serah terima) merupakan proses lanjutan setelah terjadi kesepakatan

²¹ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. (Bogor: Ghali Indonesia Anggota Ikapi, 2011), hlm. 92.

²² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*. (Jakarta: Galia Indonesia, 2009), hlm. 13-14.

antar pelaku transaksi. Bahkan terkadang proses ini mendahului adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya saja transaksi yang terjadi pada Bank BRI Syariah ini, barang yang telah sepakat dibeli tidak langsung ada di tangan nasabah setelah proses pendatanganan tersebut.

Bank syariah hingga saat ini menerapkan serah terima secara *al-hukmi* terlihat dari pernyataan diatas bahwa jika kesepakatan yang ditandatangani selesai. Maka barangnya akan sampai kurang lebih tiga hari ke tangan nasabah (pemilik barang).

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objektif penelitian di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu dikarenakan penulis sempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank BRI tersebut dan data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab masalah ini memungkinkan diperoleh di Bank BRI tersebut. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, pada tahun baru di 2016 dari bulan januari awal hingga akhir.

1. Metode Penelitian

Secara keseluruhan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut soerjono soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²³

Seperti penelitian menganalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Serah Terima Barang Pada Produk Mikro Di Bank Bri Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang. Analisis data yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian deskriptif dan prediktif.²⁴ Penelitian dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁵ Dengan alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi juga Meramalkan kecenderungan fenomena atau fakta berdasarkan data sekarang. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan ataupun mekanismenya Serah Terima Barang Pada Produk Mikro Di Bank Bri Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang.

2. Sumber Data

²³Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2001), hlm. 52.

²⁴*Ibid.*, hlm. 8.

²⁵Karnaen Perwata atmadja dan M. Syafi'i Antonio *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bank Bagi Hasil* (Jakarta : Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan Islam Bank Indonesia, 1992), cet. II, h. 4-5 dan 12-13;., *Apa dan...*, hlm. 25-28 dan 106.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri, Direktur Operasional, Staff Manajemen di Bank BRI Syariah, laporan dari bank mengenai pelaksanaan pembiayaan *murābahah bil wakalah*, data untuk produk mikro di Bank BRI Syariah Tanjungsari-Sumedang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2010), data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi, Cet 14, hlm. 24.

sedikit. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan misalnya mewawancarai Kepala Cabang BRI Syariah di Tanjungsari yaitu Bapak Gelar dan Customer Service yaitu Ibu Restu, sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, Karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan dirasa perlu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi ini seperti ; sejarah lahirnya lembaga PT Bank BRI Syariah, jenis-jenis produk yang dikembangkan, mekanisme pembiayaan *murābahah bil wakalah* kepada nasabah perorangan, laporan tingkat imbal hasil pada tahun ini di PT Bank BRI Syariah.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tak diolah. Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang

berguna dalam memecahkan masalah penelitian.²⁷ Dari segenap kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data, semata-mata bertujuan untuk dapat membantu jalannya penelitian agar dapat mencapai tujuannya yaitu melihat, memecahkan dan menjawab persoalan yang tengah dipertanyakan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang serah terima barang pada produk mikro Di Bank Bri Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang
- b. Menyeleksi data, merupakan proses dalam melakukan pengelompokan atau penentuan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, proses tahapan untuk penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari simpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

²⁷Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). Cet.3. hlm.